

## **KEBIJAKAN LUAR NEGERI ISRAEL DALAM NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN UNI EMIRAT ARAB**

**Rizki Prima Herdian<sup>1</sup>**

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis kebijakan luar negeri Israel dalam upayanya menormalisasi hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab (UEA) serta dampaknya terhadap dinamika politik di Timur Tengah. Konflik berkepanjangan antara Israel dan negara-negara Arab sejak kemerdekaan Israel pada 1948 menjadi latar belakang penelitian ini. Pada akhir 2020, Israel dan UEA mencapai kesepakatan bersejarah, Abraham Accord, yang membuka hubungan diplomatik resmi. Penelitian ini mengkaji kepentingan strategis Israel dalam mendorong UEA untuk normalisasi, serta respon dari negara-negara Muslim lainnya. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan luar negeri dan soft diplomacy. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup dokumen resmi, laporan pemerintah, serta literatur akademik. Analisis dilakukan dengan melihat interaksi kebijakan luar negeri Israel dan UEA dalam konteks regional, serta dampaknya terhadap solidaritas Arab dan dinamika kekuatan di Timur Tengah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) dipengaruhi oleh kepentingan bersama di bidang politik, keamanan, dan ekonomi, terutama terkait ancaman dari program nuklir Iran. Kebijakan luar negeri Israel dalam normalisasi hubungan dengan UEA membuka peluang besar dalam sektor teknologi, investasi, dan pariwisata, serta memperkuat stabilitas regional dan hubungan bilateral di kawasan Timur Tengah.

Kata Kunci: Normalisasi, Kebijakan Luar Negeri, Israel, Uni Emirat Arab.

### **ABSTRACT**

This study analyzes Israel's foreign policy in its efforts to normalize diplomatic relations with the United Arab Emirates (UAE) and its impact on political dynamics in the Middle East. The prolonged conflict between Israel and Arab countries since Israel's independence in 1948 is the background of this research. In late 2020, Israel and the UAE reached a historic agreement, the Abraham Accord, which opened official diplomatic relations. This study examines Israel's strategic importance in pushing the UAE to normalize, as well as the response of other Muslim countries. This research uses foreign policy theory and soft diplomacy. The research method used is a qualitative approach with descriptive analysis. Data is collected through literature studies that include official documents, government reports, and academic literature. The analysis was conducted by looking at the foreign policy interactions of Israel and the UAE in a regional context, as well as their impact on Arab solidarity and power dynamics in the Middle East. The study concludes that the normalization of diplomatic relations between Israel and the United Arab Emirates (UAE) is influenced by shared interests in the political, security, and economic fields, especially regarding the threat from Iran's nuclear program. Israel's foreign policy in normalizing relations with the UAE opens up great opportunities in the technology, investment, and tourism sectors, as well as strengthening regional stability and bilateral relations in the Middle East region.

Keywords: Normalization, Foreign Policy, Israel, United Arab Emirates.

**PENDAHULUAN**

Israel merupakan sebuah negara yang berada ditengah-tengah lautan negara Timur Tengah, dengan mayoritas penduduknya merupakan etnis Yahudi. Kemerdekaan Israel di tahun 1948 mendapatkan banyak kecaman dari negara-negara arab yang notabene merupakan negara-negara tetangga. Hal ini disebabkan karena kemerdekaan Israel merupakan bencana besar bagi Palestina yang perlahan mulai tergeser dari wilayah teritorialnya. Keberhasilan bangsa Israel dalam mendirikan Negara pada kawasan sudah “bertuan” tidak terlepas dari gerakan pemikiran dan ideologi yang mem-back up nya, yaitu zionisme. Zionisme inilah yang kemudian membuat sehingga konflik berkepanjangan dan permusuhan yang tak dapat dibendung antara Israel dan Palestina hingga saat ini .

Berdirinya negara Israel berawal dari gerakan zionisme politik yang pada awalnya hanya merupakan keyakinan bangsa Yahudi akan memiliki Negara Independen, Yahudi dengan keyakinan zionisme menempuh berbagai cara melalui lobi-lobi Internasional dengan menguasai media sehingga pada tahun 1917, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour dan menjanjikan akan mendirikan sebuah tanah air kepada Yahudi di Palestina. Dan pada tahun 1918, Palestina jatuh sehingga Jenderal Allenby merebut Palestina dari Khalifah Turki Utsmani, setahun kemudian, secara resmi mandat atas Palestina diberikan kepada Inggris oleh PBB.

Penyebutan Timur Tengah bukan hanya sebagai suatu istilah Geografis saja, melainkan merujuk kepada yang lebih yaitu sebagai konsep geopolitik yang dikonstruksi oleh Barat. Dan Istilah itu digunakan oleh angkatan laut Amerika Serikat untuk menyebut kawasan disebelah Timur sekitar gurun bekas kesultanan Ustmani yang tidak jauh dari Eropa.

Di wilayah Timur Tengah ini telah melahirkan berbagai agama-agama besar dunia dan menjadikannya sebagai kiblat dari agama tersebut seperti Yerusalem yang menjadi Kota Suci Tiga Agama, dan Mekkah sebagai Kota Suci umat Islam.

Timur Tengah juga masuk sebagai kawasan yang penting dan strategis bagi perekonomian dan politik dunia, karena letaknya yang menjadi perlintasan dagang baik darat ataupun laut dan secara historis kawasan Timur Tengah pernah menjadi pusat Peradaban Dunia.

Semenjak era Perang Dunia II berbagai negara memperebutkan kekuasaannya terhadap wilayah tersebut yang akhirnya memecah kesatuan wilayah itu menjadi Negara-negara berdaulat setelah runtuhnya kesultanan Ustmani.

Pada era pasca Perang Dunia II kawasan tersebut muncul sebagai kekuatan baru dan kembali menjadi rebutan antara Amerika Serikat dan Soviet dalam penyebaran pengaruhnya dan akhirnya memicu konflik di wilayah tersebut.

Kemerdekaan Israel akhirnya mencapai titik terang pada Tahun 1979 dimana pada Tahun tersebut Mesir menjadi negara pertama yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan disusul oleh Yordania pada Tahun 1994.

Mesir dan Yordania menjadi titik balik bagi Israel dalam perjuangan politiknya dalam mendapatkan pengakuan dan hubungan diplomatik dengan Negara-negara Arab lainnya.

Kepentingan politik setiap negara dalam membuka hubungan diplomatik negara lain dapat dilihat dari beberapa faktor dalam Hubungan Internasional seperti yang terjadi pada Israel, dimana Israel tidak bisa dengan mudah mendapatkan Hak Kemerdekaannya atau pengakuan dari beberapa negara karena terbentur oleh kepentingan-kepentingan politik negara lain, sebab dalam Hukum Internasional pembukaan hubungan diplomatik dapat artikan sebagai bentuk pengakuan kedaulatan dan bentuk terjadinya hubungan baik antara kedua negara.

Berdasarkan latar belakang diatas, melalui penelitian ini penulis bermaksud mengidentifikasi kepentingan Israel terhadap Uni Emirat Arab serta menganalisis respon negara-negara Muslim lainnya terkait kebijakan membuka hubungan diplomatik, lalu bagaimana dampak dan respon negara-negara Muslim dikawasan Timur Tengah dalam melihat sikap dan perubahan politik luar negeri Uni Emirat Arab terhadap Israel.

Dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam politik luar negeri dimana saat ini Uni Emirat Arab sedang dalam tekanan dan memiliki kepentingan nasional yang lebih penting dari pada kebersamaan dalam solidaritas kerjasama dengan Negara-negara Arab lainnya.

Dimana keadaan politik dan keamanan regional kawasan Timur Tengah memiliki pengaruh besar dalam dalam perubahan politik luar negeri Uni Emirate Arab disaat

ancaman kekuatan dari Iran dan gerakan-gerakan terorisme maupun gerakan radikalisme yang menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional Uni Emirate Arab.

Melihat fenomena dan data di atas peneliti memiliki ketertarikan untuk melihat dan menganalisis secara mendalam mengenai **“Kebijakan Luar Negeri Israel dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik dengan Uni Emirate Arab”**.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif merupakan salah satu cara guna mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau suatu cara dalam meneliti permasalahan dengan cara menggambarkan atau menjelaskan fenomena pada masa sekarang yang terjadi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, agar dapat menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dan lisan.

Keadaan dan kondisi yang didapatkan dari sekelompok manusia yang diamati, gambar atau foto, dokumen resmi serta catatan wawancara. Sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data objektif dalam rangka mengetahui topik yang dibahas. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010) yang menyatakan bahwa Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

Moleong (2017) menyimpulkan bahwa: penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu kompleks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan agar dapat menafsirkan fenomena sosial yang terjadi sehingga dapat mendeskripsikannya dalam bentuk lisan maupun tulisan yang diamati oleh peneliti.

## **KERANGKA TEORI**

### **Teori Kebijakan Luar Negeri**

Politik luar negeri merupakan bidang yang melibatkan interaksi antara suatu negara dengan aktor-aktor di luar batas wilayahnya. Namun, kompleksitas politik luar negeri

tidak terbatas pada interaksi antarnegara saja. Studi politik luar negeri juga mempertimbangkan faktor-faktor internal yang memengaruhi kebijakan dan tindakan suatu negara di tingkat internasional.

Salah satu aspek internal yang memengaruhi politik luar negeri adalah struktur politik dan kelembagaan dalam suatu negara. Sistem politik, pemerintahan, dan proses pembuatan keputusan di dalam negeri dapat memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Misalnya, dalam sistem demokratis, kebijakan luar negeri dapat dipengaruhi oleh opini publik, partai politik, dan mekanisme akuntabilitas politik. Di negara otoriter, kebijakan luar negeri mungkin lebih dipengaruhi oleh kepentingan elite politik atau keamanan nasional.

Selain itu, faktor ekonomi, sosial, dan budaya juga dapat memengaruhi politik luar negeri suatu negara. Kondisi ekonomi domestik, seperti pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan keuangan, atau ketergantungan pada sumber daya tertentu, dapat membentuk prioritas dan strategi dalam hubungan internasional. Demografi, nilai-nilai budaya, dan identitas nasional juga dapat memainkan peran dalam pembentukan kebijakan luar negeri.

Menurut Rosenau (1976), kebijakan luar negeri merujuk pada upaya suatu negara dalam menghadapi dan memanfaatkan lingkungan eksternalnya secara keseluruhan.

Tujuan utamanya adalah untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup negara tersebut. Rosenau juga menekankan bahwa studi kebijakan luar negeri melibatkan pemahaman yang luas dan kompleks, yang mencakup aspek-aspek seperti kehidupan internal dan kebutuhan eksternal suatu negara. Hal ini meliputi aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa .

1. Langkah pertama dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri mencakup: menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik;
2. Menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri;
3. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki;

4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan;
6. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki.

Sementara menurut Holsti, lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut.

### **Konsep *Soft Diplomacy***

Di dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri, diplomasi merupakan salah satu langkah konkrit. Pada prinsipnya, diplomasi adalah seni dan praktek bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi.

Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Biasanya, orang menganggap diplomasi sebagai cara mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang halus .

Diplomasi telah menjadi salah satu bagian yang vital dalam kehidupan negara dan merupakan sarana utama guna menangani masalah-masalah internasional agar dapat dicapai suatu perdamaian dunia. Melalui sarana diplomasi itu pemerintah menjalankannya dalam rangka mencapai tujuannya dan mendapatkan dukungan dari prinsip-prinsip yang dianutnya. Diplomasi yang merupakan proses politik itu terutama dimaksudkan untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lainnya.

Sebagai sebuah proses politik, diplomasi juga merupakan bagian dari usaha saling mempengaruhi yang sifatnya sangat luas dan berbelit-belit dalam kegiatan internasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi internasional untuk meningkatkan sasarannya melalui saluran diplomatik .

Menurut Sir Ernest Satow “*Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of official relations between governments of independent states*”. Yang

bermakna diplomasi adalah penggunaan dari kecerdasan dan kebijaksanaan untuk melakukan hubungan resmi antar pemerintah negara-negara merdeka.

Kadang-kadang juga dilakukan dalam hubungan negara-negara pengikutnya atau lebih singkat lagi, pelaksanaan urusan tersebut dilakukan antara negara- negara dengan cara damai”.

Menurut Harold Nicholson, *“Diplomacy is the management of international relations by means of negotiations; the method by which these relations are adjusted and managed by ambassadors and envoys the business or art of the diplomats”*. Menurut Ian Brownlie, *“Diplomasi merupakan setiap cara yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan dan berkomunikasi satu sama lain atau melaksanakan transaksi politik maupun hukum yang didalam setiap hal dilakukan melalui wakil-wakilnya yang mendapat otorisasi”*.

## **PEMBAHASAN**

### **Hubungan Israel dengan Negara-Negara di Timur Tengah**

#### **1. Ketegangan Hubungan Israel dengan Negara Di Timur Tengah**

Konflik Palestina-Israel sudah bukan hal asing untuk dibahas. Permasalahan perebutan wilayah Yerusalem tak kunjung selesai, malah terlihat kian memburuk.

Israel menyatakan Yerusalem atau Tanah Suci sebagai ibu kota negaranya, sementara Palestina di lain pihak juga menyatakan hal serupa. Konflik yang berlarut-larut memicu bertambahnya kerugian dari kedua belah pihak, contohnya adalah semakin banyaknya pelanggaran HAM yang harus dialami oleh penduduk sipil .

Awalnya, Turki Utsmâni menguasai Palestina tidak kurang dari tiga abad dan baru berpindah tangan ke Imperialisme Inggris pada tahun 1917 akibat kalah perang. Palestina seolah berpindah tangan kepada orang-orang Yahudi setelah dideklarasikannya Israel sebagai salah satu negara merdeka pada tanggal 15 Mei 1948. Israel pun semakin menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dengan memenangkan peperangan.

Akibatnya, wilayah negara Israel kian bertambah luas dari hasil pencaplokan beberapa negara Islam seperti Mesir, Yordania, Suriah, Bairut, Arab Saudi, Irak, dan Palestina sendiri.

Nasionalisme memainkan peran penting dalam konflik Israel-Palestina. Kebangkitan gerakan nasionalis Yahudi dan Palestina berkontribusi pada bentrokan identitas dan aspirasi. Nasionalisme Yahudi atau Zionisme berusaha menciptakan negara Yahudi di Palestina, sementara nasionalisme Palestina bertujuan untuk mempertahankan identitas Arab dan hak atas tanah mereka.

Permasalahan Israel-Palestina pun bukan hanya menjadi masalah internal kedua belah pihak, tetapi dunia pun ikut menyoroti dan berusaha untuk menciptakan perdamaian. Berbagai upaya untuk mendamaikan kedua bangsa ini pun gencar dilakukan meski kerap berakhir dengan kegagalan.

Upaya tersebut ditandai dengan adanya Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB tahun 1967, Perjanjian Perdamaian Camp David tahun 1978, Konferensi Madrid tahun 1991, Perjanjian Oslo tahun 1993, Perjanjian Camp David tahun 2000, Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002, Peta Jalan Damai tahun 2003, Annapolis tahun 2007, Washington tahun 2010, Siklus Eskalasi dan Genjatan Senjata, sampai KTT Paris tahun 2017. Dari beberapa upaya tersebut, terdapat juga kesepakatan antar kedua belah bangsa seperti kesepakatan atas Peta Jalan Damai yang ternyata kesepakatan tersebut tidak pernah terlaksana .

Konflik tersebut diperkeruh dengan tindakan Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, yang memproklamkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada tanggal 5 Desember 1949 tanpa tindakan yang lebih jauh lagi.

Setelah sekian lama tidak ada pembahasan lebih merinci terkait proklamasi tersebut, dunia internasional kembali dibuat gempar atas deklarasi Presiden Donald J. Trump pada tanggal 6 Desember 2017 yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal ini dinilai akan mempersulit proses perdamaian dan penerapan terkait peta jalan damai, maka Majelis Umum PBB langsung menyelenggarakan rapat darurat pada tanggal 21 Desember 2017.

Hal ini dimaksudkan untuk mendiskusikan pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem terkait rencana pemindahan kedutaan besar yang mendapat kecaman dari berbagai negara. Hasilnya, 128 negara menolak pengakuan Amerika Serikat, 9 (sembilan) negara termasuk Amerika Serikat dan Israel menyatakan dukungannya, sementara 35 negara lain abstain.

## **2. Dinamika Hubungan Israel-Uni Emirat Arab**

Hubungan antara Israel dengan negara-negara Timur Tengah telah melalui berbagai dinamika, termasuk dengan Uni Emirat Arab (UEA). Sebelum normalisasi hubungan, UEA memandang Israel dengan sikap kontradiktif, serupa dengan pandangan negara-negara Arab lainnya. Relasi ini dibentuk oleh sejarah konflik dan peperangan yang menimbulkan trauma di kawasan tersebut.

Pada awal berdirinya, Presiden pertama UEA menegaskan bahwa Israel merupakan ancaman keamanan dan musuh. Dukungan untuk memboikot Israel juga dilakukan oleh Liga Arab dan Dewan Kerjasama Negara Teluk (GCC). Sebagai anggota Liga Arab, UEA menolak mengakui legitimasi negara Israel.

Uni Emirat Arab menerapkan berbagai tindakan boikot, termasuk memblokir maskapai penerbangan, nomor telepon, dan secara resmi melarang warga Israel untuk mengunjungi negara tersebut, sejalan dengan kebijakan negara-negara Arab lainnya.

Namun, pada tahun 2020, terjadi perubahan signifikan dalam hubungan ini dengan ditandatanganinya Abraham Accords, yang menandai normalisasi hubungan antara Israel dan UEA. Kesepakatan ini membuka jalan bagi kerja sama dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, teknologi, dan pariwisata. Normalisasi hubungan ini mencerminkan perubahan geopolitik di kawasan Timur Tengah, di mana beberapa negara Arab mulai melihat manfaat strategis dan ekonomi dari hubungan yang lebih dekat dengan Israel.

Uni Emirat Arab memutuskan untuk tidak mengakui kedaulatan Israel, dalam rangka mematuhi Arab Peace Initiative yang merupakan hasil dari kesepakatan negara-negara yang tergabung di Liga Arab. Kendati begitu, diketahui bahwa serangkaian kerjasama telah dilakukan oleh Uni Emirat Arab dan Israel secara tersembunyi, bahkan sebelum keduanya melakukan normalisasi hubungan.

Serangkaian kerjasama tersebut meliputi: perdagangan, energi, olahraga, dan keamanan. Di bawah ini merupakan segenap rangkuman dari berbagai kegiatan yang menandai adanya hubungan baik antara uni Emirat Arab dengan Israel sebelum aksi normalisasi.

Lalu Hubungan keduanya terindikasi adanya unsur saling ingin memperbaiki dengan membangun kerjasama bilateral karena kedua negara telah melakukan atau

sudah terjalin kerja sama secara rahasia jauh sebelum kedua negara melakukan legalitas secara administrasi internasional. Sebagai contohnya ketika Menteri Infrastruktur Uzi Landau tiba di Abu Dhabi pada hari Sabtu untuk menghadiri konferensi yang dijadwalkan pada hari minggu untuk membahas keputusan mengenai Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA).

Alasan hadirnya Menteri Uzi Landau adalah karena telah diizinkan oleh perwakilan Abu Dhabi untuk menghadiri kegiatan yang di selenggarakan di kantor pusa yang berada di Abu Dhabi.

Pada tahun 2015, pemerintah Uni Emirat Arab memberikan izin kepada Israel untuk membuka kantor diplomatik di Abu Dhabi. Akan tetapi, kantor diplomatik ini secara khusus hanya untuk memfasilitasi keanggotaan Israel pada agenda International Renewable Energy Agency (IRENA).

Setelahnya, diketahui bahwa Israel sudah lama berpartisipasi secara aktif pada agenda ini, namun belum memiliki kantor resmi. Sehingga, pemberian izin atas pembukaan kantor diplomatik tersebut bertujuan untuk memudahkan partisipasi Israel kedepannya.

Adapun, serangkaian kerjasama pada sektor ekonomi juga telah berlangsung antara kedua negara. Dalam konteks ini, kerjasama ekonomi yang dimaksud meliputi hal-hal seperti: ekspor-impor, serta kesepakatan bisnis antara perusahaan yang mengimplementasikan proyek di Israel dan UEA .

Adapun, perusahaan- perusahaan Israel yang terlibat dalam kesepakatan bisnis tersebut seringkali teregistrasi di bawah perusahaan lain di negara ketiga. Di lain sisi, produk-produk yang diekspor dari Israel menuju UEA meliputi: peralatan medis, telekomunikasi, bahan baku, produk pertahanan, mesin dan rekayasa, serta konsultasi dan produk terkait pertanian dan makanan.

Salah satu contoh dari skema kerjasama yang pernah berlangsung adalah pada tahun 2008 ketika AGT International, perusahaan Israel, dikontrak oleh pemerintah Abu Dhabi untuk memasang pagar elektronik, sistem sensor dan kamera untuk memantau perbatasan dan mengamankan ladang minyak dan gas alam di UEA .

Selain itu, diketahui bahwa Uni Emirat Arab dan Israel juga melakukan serangkaian kerjasama pada bidang keamanan. Diketahui bahwa, Uni Emirat Arab dan Israel seringkali

berpartisipasi pada latihan militer multilateral dan pertukaran intelijen dan peralatan militer. Tidak hanya itu, UEA dikabarkan telah melaksanakan kerjasama trilateral rahasia dengan Amerika Serikat dan Israel yang digelar pada 17 Desember 2019. Kerjasama trilateral ini berupa koordinasi antar ketiga negara untuk meningkatkan keamanannya dari Iran. Namun, kerjasama ini juga merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menciptakan hubungan baru antara negara-negara Arab dengan Israel. Hal ini ditandai dengan objektif lain yang ingin dicapai dari kerjasama ini, yaitu berupa pakta non-agresi antara Uni Emirat Arab dengan Israel. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kerjasama trilateral ini merupakan cikal bakal dari normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel.

### **Pengaruh Israel di Timur Tengah**

Israel adalah sebuah negara yang lihai dalam melakukan lobi-lobi Internasional, sehingga pada konteks kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) khususnya ke Timur Tengah, situasi politik dalam negeri amat berperan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Louis Fawcett memaparkan bahwa ada enam elemen dalam negeri yang sangat berpengaruh dalam proses perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yaitu *The White House, The Executive Branch, The Legislative Branch, Political Parties, Opinion Makers dan The Lobbies*.

Dari keenam elemen tersebut, peneliti menyoroti kelompok pelobi dalam penelitian ini. Gabriel Almond memaparkan bahwa para pelobi tergabung ke dalam jenis kelompok kepentingan yang berusaha untuk memperjuangkan kepentingannya melalui lobi kepada pemerintah, Pemaparan tersebut menjelaskan bahwa kelompok kepentingan adalah organisasi domestik yang berusaha untuk memengaruhi pemerintah tanpa mengesampingkan keberadaan publik.

Perubahan yang terjadi di wilayah Timur Tengah ini menawarkan beberapa keuntungan bagi keamanan Israel. Melalui gejolak dalam negeri yang menyita perhatian banyak pemimpin regional, musuh-musuh tradisional negara Arab tidak lagi dapat mengajukan tantangan terhadap Israel seperti yang dulu mereka bisa lakukan.

Beberapa dari mereka lebih memilih untuk mengambil keuntungan dari tujuan Bersama dengan Israel dalam menghadapi Iran dan memobilisasai dukungan Amerika untuk upaya ini. Proses ini telah mencapai puncaknya akhir-akhir ini, dengan normalisasi

hubungan antara Israel dan Uni Emirate Arab serta Bahrain, bergerak secara diam-diam dan aktif didukung oleh Arab Saudi.

Uni Emirat Arab menjadi negara Arab ketiga yang baru-baru ini melakukan hubungan normalisasi dengan Israel. Sebagai negara yang kaya minyak dan sebagai pemain baru yang mulai menunjukkan pengaruh besar di kawasan, peristiwa bersejarah ini dapat menjadi langkah awal dalam transformasi di Timur Tengah.

Normalisasi ini mengangkat kesepakatan investasi, pariwisata, penerbangan langsung, kemananan , telekomunikasi dan teknologi. Di sisi lain, Israel tampaknya mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam hal manfaat domestik dan memberikannya mitra regional yang sangat berharga. Perjanjian dengan Uni Emirat Arab memberikan Israel jembatan resmi dan stabil keseluruh dunia Arab, terutama monarki teluk lainnya.

Kemungkinan membuka pasar Arab sangat besar dan berpotensi menghadirkan pasar ekspor yang besar yang sebelumnya tidak tersedia bagi perusahaan-perusahaan Israel.

Terlihat perbedaan dalam upaya Israel membangun hubungan dengan negara sekitarnya. Dahulu, Kerjasama dan kesepakatan perdamaian dibentuk atas dasar alasan konflik, perbatasan, keamanan, dan ekonomi saja seperti yang terjadi dengan Mesir dan Yordania.

Kesepakatan perdamaian saat ini dibentuk atas dasar keamanan untuk membendung pengaruh Iran dan ekonomi, juga dengan sebab masing-masing negara melihat potensi yang dimiliki negara lain yang lebih dekat kepada kesadaran untuk bekerjasama dari pada paksaan untuk bekerjasama.

## **Persamaan Kepentingan Israel dengan Uni Emirat Arab**

### **1. Kepentingan Politik**

Persamaan kepentingan di bidang politik menjadi salah satu kepentingan bersama antara Israel dan UEA yang mendorong normalisasi hubungan diplomatik kedua negara. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis dengan menggunakan matriks kepentingan nasional, kepentingan politik UEA dalam normalisasi hubungan dengan Israel dapat dikategorikan sebagai *Defense of Homeland*.

Kepentingan ini kemudian digolongkan sebagai kepentingan yang memiliki tingkat urgensi vital dimana kepentingan ini mempengaruhi stabilitas UEA sebagai sebuah negara .

Ancaman yang diberikan Iran dengan memulai program pengembangan senjata nuklir membuat UEA merasa khawatir dan terancam. Maka dari itu Israel dan UEA bersama – sama berusaha untuk menghentikan program nuklir Iran dengan melakukan lobby di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Pada awalnya, pengembangan program nuklir yang dilaksanakan oleh Iran diperbolehkan oleh PBB karena bertujuan untuk mengembangkan industri dalam negeri Iran berkaitan dengan pengembangan penelitian energi nuklir. Tetapi kemudian berdasarkan pemantauan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Iran telah melampaui batas yang telah ditetapkan dalam *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) dimana melakukan pengembangan nuklir untuk menjadi senjata bagi negara mereka. Maka dari itu PBB menghimbau Iran untuk kembali patuh dengan kebijakan di dalam JCPOA serta untuk mengatasi kekhawatiran yang dinyatakan oleh negara – negara lain, salah satunya adalah Israel dan UEA.

Kepentingan politik UEA dapat dikatakan vital dikarenakan adanya dominasi oleh Iran terkait program nuklir yang dirasa mengancam UEA sebagai salah satu negara di kawasan Timur Tengah. Kepentingan politik UEA hadir untuk mencegah perbedaan pemahaman dengan Iran terkait nuklir di kancah internasional.

Melalui kerjasama di bidang politik antara Israel dan UEA menunjukkan kesepahaman antara kedua negara terkait ancaman tersebut. Penolakan yang dilakukan melalui PBB merupakan strategi politik yang dilakukan untuk membatalkan rencana Iran tersebut. Dengan sepakatnya Israel dan UEA di forum PBB membuat kepentingan bersama mereka lebih mungkin terjadi untuk mencegah nuklir Iran tersebut.

## **2. Kepentingan Keamanan**

Kemudian kepentingan keamanan juga merupakan salah satu aspek penting yang mendorong UEA untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan matriks kepentingan nasional, kepentingan pertahanan dan keamanan menjadi kepentingan yang mendorong terjadinya peristiwa normalisasi hubungan diplomatik antara UEA dengan Israel yang masuk ke dalam kategori *Defense of Homeland*.

Kepentingan ini kemudian memiliki tingkat urgensi vital dimana dengan terlaksananya kepentingan ini akan meningkatkan kapabilitas serta kemampuan UEA

dalam menghadapi ancaman-ancaman keamanan yang ada. Hal tersebut yang mendasari kepentingan ini menjadi prioritas utama oleh para pembuat kebijakan di kedua negara tersebut .

Selain itu kepentingan pertahanan dan keamanan ini memiliki tingkat urgensi vital karena dengan melaksanakan kerjasama dengan Israel, UEA kemudian mendapatkan bantuan dari AS dalam bidang militer terutama terkait penjualan senjata. Bantuan ini dipandang sebagai keuntungan bagi UEA karena seperti yang diketahui bahwa AS merupakan negara adidaya dengan kemampuan di bidang militer yang maju di dunia internasional.

Maka dari itu kepentingan pertahanan dan keamanan yang dimiliki oleh UEA dalam peristiwa normalisasi hubungan dengan Israel masuk ke dalam kategori urgensi vital karena melihat besarnya perkembangan ancaman yang disebabkan oleh Iran dalam beberapa tahun terakhir

### **3. Kepentingan Ekonomi**

Kebijakan Luar Negeri Israel dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik dengan Uni Emirat Arab

- a. Pembukaan Hubungan Diplomatik
- b. Kebijakan Kerja Sama Ekonomi
  - 1) Penerapan Kebijakan Operation Alcohida (Operasi Selamat Datang)
  - 2) Penerapan Operation Controllez (Operasi Pengawasan)

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat ditarik simpulan bahwa pengungsi Venezuela yang berada di wilayah perbatasan Brazil menimbulkan permasalahan dan bahkan ancaman bagi negara Brazil itu sendiri dikaitkan dengan keamanan global yang ada.

Pengungsi banyak yang meninggalkan negaranya untuk mencari tempat berlindung dan kehidupan yang lebih baik ke negara tetangga mereka, diantaranya yaitu Brazil terutama di wilayah Roraima bagian utara Brazil. Brazil merupakan negara yang berbatasan dengan Venezuela dan dapat dilalui melalui jalur darat, inilah salah satu alasan mengapa Brazil dipilih sebagai negara tujuan pengungsi Venezuela.

Adanya krisis Pengungsi Venezuela sebelum Brazil menerapkan kebijakan *Operation Acolhida* Brazil menerapkan kebijakan untuk mengatasi terhadap pengungsi dengan cara melakukan diplomasi dengan pemerintahan Venezuela agar mengatur tentang warga negaranya sebagai pengungsi yang akan melintas ke negara Brazil dianggap dapat menjadikan ancaman baik budaya, nasionalisme dan negara.

Program kebijakan *Operation Acolhida* atau disebut dengan Operasi Selamat Datang dengan menggunakan aset militer untuk transportasi udara dan penyaluran logistik serta untuk memperkuat wilayah perbatasan yang dilakukan bersama badan-badan PBB dan pemerintahan Venezuela.

*Operation Acolhida* dilaksanakan sesuai dengan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 serta bertindak sesuai dengan kapasitas dan hak mereka untuk memberikan bantuan tempat tinggal yang sangat dibutuhkan, bantuan makanan, program mata pencaharian, pengecekan kesehatan gratis serta proses interiorisasi. *Operation Acolhida* diatur dalam 3 pilar yang berisikan kegiatan dari berbagai sektor, seperti bantuan langsung, perlindungan terhadap pengungsi dan proses relokasi untuk pengungsi.

Kebijakan Pemerintah Brazil dalam menangani pengungsi telah menunjukkan perannya dengan baik bersama mitra kerjanya melalui penerapan Diplomasi dengan negara Venezuela, selanjutnya Pemerinah Brazil bekerjasama dengan Pemerintah Venezuela melaksanakan melakukan penerapan kebijakan *Operation Controlez* atau kebijakan operasi pengawasan dan patroli Bersama antara pihak negara Brazil dan Venezuela. Meskipun Brazil ada kemajuan dalam menangani para pengungsi akan tetapi masih banyak yang harus dilakukan untuk melindungi hak-hak pengungsi di Brazil.

**SARAN**

Saran-saran yang perlu disampaikan berkaitan dengan kebijakan pemerintah Brazil dalam menghadapi masalah pengungsi dari Venezuela di tahun 2018 diantaranya memerlukan pendekatan yang realisme dan berkelanjutan. Saran berikut adalah saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini:

**1. Kesimpulan dalam Tesis ini dapat ditindaklanjuti dengan penelitian selanjutnya mengingat permasalahan pengungsi begitu kompleks.** Penelitian di atas menjawab permasalahan pengungsi secara umum tentang proses yang dilakukan, sehingga terdapat

banyak pertanyaan yang belum dijawab secara tuntas dan mendalam. Penelitian juga belum membenturkan permasalahan pengungsi dalam pelbagai aliran pemikiran Hubungan Internasional tentang input dan output yang harus digali. Penelitian selanjutnya dapat menysasar permasalahan pengungsi dari sudut input dan output terhadap kebijakan dan respon negara Brazil terhadap pengungsi Venezuela. Setiap negara memiliki kebijakan yang beragam sebagaimana digambarkan sebelumnya. Sangat menarik jika respon spesifik masing-masing negara dikuliti kemudian membandingkannya dengan nilai hubungan Internasional dan kebijakan- kebijakan yang diambil oleh suatu negara. Penelitian ini juga baru menjawab tentang cara atau proses terhadap permasalahan pengungsi secara umum. Belum terdapat jawaban lebih jelas bagaimana output yang dihasilkan dari kebijakan yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh pemerintah Venezuela dan pemerintah Negara Brazil. Peran lembaga internasional lainnya dalam mengatasi permasalahan pengungsi ke dalam kondusifitas pengungsi yang relative aman dan tidak ada permasalahan. Di luar kedua ide tersebut diatas, beberapa ide lain pada isu ini yang dapat diteliti selanjutnya seperti, analisis komparatif pengalaman pengungsi di pelbagai negara, dampak persepsi negara lain terhadap perlakuan pengungsi di negara-negara ameriks Latin, pengalaman pengungsi perempuan muslim, krisis pengungsi di negara-negara mayoritas muslim, dampak migrasi paksa terhadap identitas keagamaan pengungsi muslim, tantangan yang dihadapi pengungsi muslim dalam mengakses pendidikan dan kesempatan kerja di negara penerima suaka.

**2. Bagi Pemerintah Brazil sebagai penerima pengungsi, semoga penelitian ini menjadi semangat untuk memajukan regulasi Negara Brazil untuk lebih perhatian kepada pengungsi.** Semoga ke depan para Peneliti bisa memberikan solusi berkelanjutan kepada pengungsi. Bagi negara asal pengungsi, semoga lebih banyak lagi ruang dalam regulasi agar setiap orang di dunia ini bisa mengungsi dengan mudah jika diperlukan.

**3. Bagi Institusi akademik, pihak pemerintah Brazil maupun Venezuela, termasuk organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan pengungsi.** Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada semua warga negara tentang kewajiban perlindungan pengungsi dan rekomendasi lainnya terkait perubahan kebijakan yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan.

**4. Bagi Peneliti lain Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk memahami lebih jauh permasalahan dan kebutuhan pengungsi.** Termasuk mengurangi stigma negatif terhadap pengungsi. Apa yang diuraikan dalam tulisan ini hendak mengajak lebih banyak lagi diskusi dan penelitian terkait isu pengungsi dari perspektif Hubungan Internasional. Keseluruhannya ditujukan untuk memajukan dan membumikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai sumber pemecahan permasalahan sosial di dunia. Saran-saran ini semoga bisa menjadi titik awal dalam menyusun strategi yang komprehensif dalam menghadapi masalah pengungsi dari Venezuela di Brazil pada tahun 2018.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.Tahm, R., Rosyidin, M., & Alfian, M. F. (2022). Analisis Kepentingan Uni Emirate Arab dalam Normalisasi Hubungan dengan Israel. *Journal Of International Relations*, 12-14.
- Abidin, Y. (2019). *Pengantar Politik Luar Negeri*. Jakarta: Lembaga Penerbitan UNAS.
- Ahmadi, S. (2022). Normalisasi Hubungan Diplomatik Uni Emirat Arab – Israel: Analisis Rasionalitas Kebijakan Politik Luar Negeri Uni Emirat Arab. *Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 5(2).
- Alkebti, S. (2021). What the UAE Embassy in Israel Means for Both Countries - Opinion. Retrieved from The Jerusalem Post: <https://www.jpost.com/opinion/what-the-uae-embassy-in-israel-means-for-both-countries-opinion-674788>
- Arnaout, A. (2021). UAE Embassy in Israel Celebrates Anniversary of Normalization Deal. Retrieved from AA: <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/uae-embassy-in-israel-celebrates-anniversary-of-normalization-deal/2365319>
- Atack, I. (2005). *The Ethics of Peace and War*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Baqi, A. M. (2022). From Foes to Friends: The Normalization of the United Emirates Arab and Israel Relations. *Insignia Journal of International Relations*, 9(1).
- Barron, R. (2020). *What Do Normalized Israel-UAE Relations Mean for the Region?* Washington: The United States Institute of Peace.

- BBC Indonesia. (2017, Desember 4). Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel 'akan timbulkan gejolak ' di dunia Islam. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42224270>
- Benn, A. (2013). Israel Selling Military Wares to Mideast Countries, Britain Says. Retrieved from Haaretz: <https://www.haaretz.com/2013-06-11/ty-article/.premium/israel-selling-arms-to-muslim-countries/0000017f-f6dd-ddde-abff-fefd6ce00000>
- Benny, J. (2020). UAE-Israel Business Leaders Summit: Fintech Innovation Cannot Grow in An Over-regulated Environment. Retrieved from Gulf News: <https://gulfnews.com/business/uae-israel-business-leaders-summit-fintech-innovation-cannot-grow-in-an-over-regulated-environment-1.1607961427070>
- Bob, Y. J. (2021). Israel, UAE Jumping Forward with Fintech Cooperation. Retrieved from The Jerusalem Post: <https://www.jpost.com/middle-east/israel-uae-jumping-forward-with-fintech-cooperation-682362>
- Bramastra, A. (2017, September 21). Kisah Perang Enam Hari, Inilah Penyebab Israel Bisa Merebut Yerusalem di 1967. Retrieved from Tribun News: <https://www.tribunnews.com/internasional/2017/12/21/kisah-perang-enam-hari-inilah-penyebab-israel-bisa-merebut-yerusalem-di-1967?page=4>
- Carr, W. G. (1993). Yahudi Menggenggam Dunia. Jakarta: Pustaka Kautsar.
- Chowdhury, F. (2021). Dreams of Achieving Economic Diplomacy. Retrieved from Khaleej Times: <https://www.khaleejtimes.com/supplements/dreams-of-achieving-economic-diplomacy>
- Dubai Chamber. (2020). Dubai Chamber and Tel Aviv Chamber Sign Agreement to Foster Bilateral Cooperation. Retrieved from <https://www.dubaichamber.com/en/media-center/news/dubai-chamber-and-tel-aviv-chamber-sign-agreement-to-foster>
- Harkov, L. (2021). Israel, US, UAE, India agree to launch joint economic forum. Retrieved from The Jerusalem Post: <https://www.jpost.com/breaking-news/yair-lapid-speaks-with-blinken-uae-and-indian-foreign-ministers-682422>
- Hobbes, T. (2002). Leviathan. New York: Simon & Schuster.
- Holsti, K. (1992). Politik International: Suatu Kerangka Analisis. Bandung: Bina Cipta.

- Jemadu, A. (2008). *Politik Global : dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- John, I. (2022). UAE-Israel Trade Poised to Exceed \$10b in 5 Years. Retrieved from Khaleej Times: <https://www.khaleejtimes.com/business/uae-israel-trade-poised-to-exceed-10b-in-5-years>
- Lawati, A. A. (2020, Juni 10). UAE Sees More Economic Pain Before a Fourth Quarter Recovery . Retrieved from Bloomberg: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-10/uae-sees-further-economic-pain-ahead-of-fourth-quarter-recovery>
- Lawler, D., & Ravid, B. (2020). Scoop: Israel and UAE Discuss Anti-Iran Cooperation at Secret White House Meeting. Retrieved from Axios: <https://www.axios.com/2020/02/04/israel-uae-white-house-meeting-iran-trump-kushner>
- Levine, C. (2020). Israeli, UAE Law Firms to Collaborate on Framework for Business Ties. Retrieved from The Jerusalem Post: <https://www.jpost.com/israel-news/israeli-uae-law-firms-to-collaborate-on-framework-for-business-ties-639520>
- Mas'ood, M. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Meran, M. (2019). Perdamaian Dalam Prspektif Katolik dan Islam. *Jurnal Jumpa*, 7(2), 73-91.
- Mill, D. V. (2002). Civil Liberty in Hobbes's Commonwealth. *Australian Journal of Political Science*, 37(1).
- Miswah, M. (2023). The Effect of the Normalization of UEA-Israel Bilateral Relationship on the Improvement of the Economies of the Both Countries In 2020-2022. *Mediasi Journal of International Relations*, 4(1).
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muchsin, M. A. (2015). Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik, dan Masa Depan. *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 390 - 406.
- Muhamad, S. V. (2020). Normalisasi Hubungan Uni-Emirat Arab-Israel dan Isu Palestina. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual*, 12(17).

- Mulki, H., & Ereli, G. (2020). THE UAE-ISRAEL NORMALIZATION: POLITICAL AND SOCIAL IMPLICATIONS. Ankara: ORSAM. Retrieved from [https://orsam.org.tr/d\\_hbanaliz/the-uae-israel-normalization-political-and-social-implications-.pdfbilateral-cooperation/](https://orsam.org.tr/d_hbanaliz/the-uae-israel-normalization-political-and-social-implications-.pdfbilateral-cooperation/)
- Fatonah, T. (2017, Desember 22). 128 Menolak 9 Menerima! Ini Daftar Lengkap Negara-negara yang Ikut Voting Majelis Umum PBB. Retrieved from Tribun News: <https://www.tribunnews.com/internasional/2017/12/22/128-menolak-9-menerima-ini-daftar-lengkap-negara-negara-yang-ikut-voting-majelis-umum-pbb>
- Frantzman, S. J. (2020). Unique Event in Dubai Brings Together Museum and Israeli Heritage Center. Retrieved from The Jerusalem Post: <https://www.jpost.com/middle-east/unique-event-in-dubai-brings-together-museum-and-israeli-heritage-center-651338>